



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
UNIT KERJA : WAKIL PIMPINAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **MUHIDIN**
2. Jabatan : **WAKIL GUBERNUR**
3. NHK : **42714**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 150.504.145.239

1. Tanah Seluas 552 m2 di KAB / KOTA KOTA BANJARMASIN ,
HASIL SENDIRI Rp. 1.380.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 1335 m2/1356.66 m2 di KAB / KOTA
BANJARMASIN , HASIL SENDIRI Rp. 4.060.895.000
3. Tanah Seluas 50 m2 di KAB / KOTA KOTA BANJARMASIN , HASIL
SENDIRI Rp. 25.000.000
4. Tanah Seluas 923 m2 di KAB / KOTA KOTA BANJARMASIN ,
HASIL SENDIRI Rp. 461.500.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 347 m2/132 m2 di KAB / KOTA KOTA
BANJARMASIN , HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000.000
6. Tanah Seluas 120000 m2 di KAB / KOTA BANJAR, HASIL
SENDIRI Rp. 1.200.000.000
7. Tanah Seluas 600000 m2 di KAB / KOTA BANJAR, HASIL
SENDIRI Rp. 10.000.000.000
8. Tanah Seluas 8940 m2 di KAB / KOTA KOTA BANJARMASIN ,
HASIL SENDIRI Rp. 1.450.000.000
9. Tanah Seluas 2036 m2 di KAB / KOTA KOTA BANJARMASIN ,
HASIL SENDIRI Rp. 2.036.000.000
10. Tanah dan Bangunan Seluas 410 m2/319 m2 di KAB / KOTA KOTA
JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000.000
11. Tanah dan Bangunan Seluas 965 m2/945 m2 di KAB / KOTA KOTA
BANJARMASIN , HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000.000
12. Tanah Seluas 319 m2 di KAB / KOTA TAPIN, HASIL SENDIRI Rp.



63.800.000

13. Tanah Seluas 489 m2 di KAB / KOTA TAPIN, HASIL SENDIRI Rp.

733.500.000

14. Tanah dan Bangunan Seluas 1520 m2/300 m2 di KAB / KOTA TAPIN, HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000

15. Tanah dan Bangunan Seluas 1800 m2/1040 m2 di KAB / KOTA TAPIN, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000

16. Tanah Seluas 149 m2 di KAB / KOTA KOTA BANJARMASIN , HASIL SENDIRI Rp. 149.000.000

17. Tanah Seluas 1887 m2 di KAB / KOTA KOTA BANJARMASIN , HASIL SENDIRI Rp. 619.000.000

18. Tanah dan Bangunan Seluas 216 m2/65 m2 di KAB / KOTA KOTA BANJARMASIN , HASIL SENDIRI Rp. 201.500.000

19. Tanah dan Bangunan Seluas 152801 m2/4028 m2 di KAB / KOTA KOTA BANJARMASIN , HASIL SENDIRI Rp. 89.733.931.139

20. Tanah dan Bangunan Seluas 183 m2/183 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 10.983.228.300

21. Tanah dan Bangunan Seluas 104 m2/104 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 6.359.790.800

22. Tanah dan Bangunan Seluas 180 m2/180 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000.000

23. Tanah Seluas 10530 m2 di KAB / KOTA KOTA BANJARMASIN , HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000

24. Tanah Seluas 2957 m2 di KAB / KOTA KOTA BANJARMASIN , HASIL SENDIRI Rp. 1.034.950.000

25. Tanah Seluas 3224 m2 di KAB / KOTA KOTA BANJARMASIN , HASIL SENDIRI Rp. 1.891.050.000

26. Tanah Seluas 285 m2 di KAB / KOTA KOTA BANJARMASIN , HASIL SENDIRI Rp. 171.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp.

3.175.000.000

1. MOTOR, HARLEY DAVIDSON SEPEDA MOTOR Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 475.000.000

2. MOBIL, MINI COOPER MINIBUS Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000

3. MOBIL, LEXUS LX570 Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 2.050.000.000



C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	17.050.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	121.797.500.000
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	160.481.720.708
F. HARTA LAINNYA	Rp.	13.135.103.428
Sub Total	Rp.	466.143.469.375
III. HUTANG	Rp.	44.365.060.735
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	421.778.408.640

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.